



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANANG SANTOSA
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 510348

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 413 m2/253 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/54 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 33.000.000**

1. MOTOR, HONDA NF 100D Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 TD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 29.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. 15.000.000****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 154.146.347****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---****Sub Total****Rp. 4.031.646.347****III. HUTANG****Rp. 762.683.108****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 3.268.963.239**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.